

FRAMING MEDIA DALAM BERITA RUU PILKADA

**(Analisis *Framing William A. Gamson dan Andre Modigliani* Pada Berita RUU
PILKADA di Media Online Viva.co.id dan Metrotvnews.com Periode 25**

September – 15 Oktober 2014)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

**Luthfi Afif Azzaenuri
10730100**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Luthfi Afif Azzaenuri

Nomor Induk : 10730100

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : *Public Relation*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan tidak pernah memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya / penulisan sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penulisan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan pengaji.

Yogyakarta, 31 Mei 2015

Yang Menyatakan,



Luthfi Afif Azzaenuri

NIM. 10730100



NOTA DINAS PEMBIMBING

UIN.02/KP 073/PP. 09/013/2014

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudari :

Nama Mahasiswa : Luthfi Afif Azzaenuri
Nomor Induk : 10730100
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : *Public Relation*

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudari tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2015
Pembimbing,

Alip Kunandar, M. Si
NIP. 19760626 200901 1 010



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/ 718 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : FRAMING MEDIA DALAM BERITA RUU PILKADA
(Analisis Framing William A. Gamson dan André Modigliani Pada Berita RUU PILKADA di Media Online Viva.co.id dan Metrotvnews.com Periode 25 September - 15 Oktober 2014)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Luthfi Afif Azzaenuri
NIM : 10730100

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, tanggal: 15 Juni 2015
dengan nilai : 88 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Alip Kunandar, S.Sos.,M.Si
NIP. 19760626 200901 1 010

Pengaji I

Drs. Siantari Rihartono, M.Si
NIP.19600323 199103 1 002

Pengaji II

Drs. H. Bono Setyo, M.Si
NIP. 19690317 200801 1 013

Yogyakarta, 24 -6 -2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

D E K A N

Dr. H. Kamsi, MA

NIP. 1970207 198703 1 003



MOTTO

“Sedikit bicara, banyak menyalip”

- M. Faizi -

“Three things cannot be long hidden; the sun, the moon, the truth”

- Buddha -

*“Where the mind is without fear
And the head is held high
Where knowledge is free”*

- Rabindranath Tagore -

*“Resiko dari bersikap konsisten adalah kehilangan teman.
Resiko dari bersikap inkonsisten adalah kehilangan diri sendiri”*

- Ma'lik Junaidi -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Framing Media Dalam Berita RUU Pilkada (Analisis Framing William A. Gamson & Andre Modigliani pada Berita RUU Pilkada di media Online Viva.co.id dan Metrotvnews.com Periode 25 September – 15 Oktober 2014)”**.

Peneliti menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Kamsi, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Bono Setyo, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Alip Kunandar, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti selama mengerjakan skripsi.
4. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
5. Alm. Bapak yang selalu mendorong peneliti untuk selalu belajar dan semangat menjalani hidup dengan tanpa menyusahkan orang lain.
6. Ibu tercinta yang selalu tegar menghadapi segala persoalan, menjaga adik-adik sendirian, dan menghidupi adik-adik sendirian. Cintamu sungguh penuh seluruh.
7. Sahabat-sahabat tercinta yang telah sudi menjadi keluarga baru peneliti ; Zuhri, Muiz, Ong Hasbul, Resar, Kholid, Naufil, Alfa, Uchu, Gathit, Mawaddah, Alya, serta semua anggota Korp Arimaja PMII Humaniora Park.
8. Sahabat-sahabat PMII Humaniora Park, Korp Rhoma Irama (Mas Joe & Mas Zam), Korp Palang (Mas Jen, Qmox, dll), Korp Semar (Nick Rosyid, Mas

- Fathol, Ong MD, Mas Badi, Mas Alim, dll), Korp Karpet (Mas Safar, Mas Hasan Ma'ali, Najib, Aman, dll), Korp Pandhawa (Imam, Khalim, Salman, dll), Korp Gareng (Memet, Fuad, Temon, Arif, Aim, Fitri, dll), Korp Blangkon, (Hibban, Hendris, Yanto, Rudi, Luknia, Oneng, dll), Korp Hanoman (Dien, Aab, Didi, Ucup, Anti, dll), Korp Gamelan (Thoriq, Dea, dll) walau sering konflik semoga tetap menarik.
9. Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. Kawan-kawan HMI, KAMMI, dan IMM UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi *sparing partner*.
 11. Pace, tanti, dan Teman-teman ilmu komunikasi angkatan 2010.
 12. RA, seperti kain dengan kapas, engkau kapas dalam kainku.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan semua pihak di atas.

Kritik dan saran untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan sangat diharapkan oleh peneliti.

Wallahu muafiq ilaa aqwamiththoriq

Yogyakarta, 31 Mei
2015

Peneliti,

Luthfi Affif Azzaenuri

NIM. 10730100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
1. Manfaat Akademis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA	8
F. LANDASAN TEORI.....	12
1. Konstruksi Sosial	12
2. Konstruksi Sosial Media Massa	13
3. Jurnalisme Online	15
4. Analisis Framing	16
5. Demokrasi	19

G. Unit Analisis	23
H. METODE PENELITIAN.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Subjek Penelitian	25
3. Objek Penelitian	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
6. Metode Keabsahan Data	29
BAB II GAMBARAN UMUM	31
A. RUU PILKADA	31
B. Viva.co.id	33
1. Sejarah	33
2. Susunan Redaksi	35
3. Karakteristik Pemberitaan	36
C. Metrotvnews.com	38
1. Sejarah	38
2. Susunan Redaksi	40
3. Karakter Pemberitaan	41
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Analisis	44
1. Analisis Framing Berita Viva.co.id	44
2. Analisis Framing Berita Metrotvnews.com	69

B. Pembahasan Hasil Analisis Framing Berita Viva.co.id dan Metrotvnews.com	92
1. Pembahasan Hasil Analisis Framing Berita Viva.co.id..	92
2. Pembahasan Hasil Analisis Framing Berita Metrotvnews.com	95
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian yang Sudah Dilakukan	11
Tabel 2 : Definisi <i>Framing</i> Menurut Beberapat Tokoh	17
Tabel 3 : Perangkat <i>Framing</i> Gamson & Modigliani	24
Tabel 4 : Daftar Berita RUU Pilkada Viva.co.id	45
Tabel 5 : Analisis Berita 1 Viva.co.id	48
Tabel 6 : Analisis Berita 2 Viva.co.id	52
Tabel 7 : Analisis Berita 3 Viva.co.id	56
Tabel 8 : Analisis Berita 4 Viva.co.id	61
Tabel 9 : Analisis Berita 5 Viva.co.id	64
Tabel 10 : Analisis Berita 6 Viva.co.id	68
Tabel 11 : Daftar Berita RUU Pilkada Metrotvnews.com	69
Tabel 12 : Analisis Berita 1 Metrotvnews.com	72
Tabel 13 : Analisis Berita 2 Metrotvnews.com	76
Tabel 14 : Analisis Berita 3 Metrotvnews.com	79
Tabel 15 : Analisis Berita 4 Metrotvnews.com	82
Tabel 16 : Analisis Berita 5 Metrotvnews.com	86
Tabel 17 : Analisis Berita 6 Metrotvnews.com	89
Tabel 18 : Analisis Berita 7 Metrotvnews.com	92
Tabel 19 : Hasil Analisis Viva.co.id dan Metrotvnews.com.....	97
Tabel 20 : Daftar Berita RUU Pilkada Viva.co.id 25 Oktober - 15 November 2014.....	114

Tabel 21 : Daftar Berita RUU Pilkada Metrotvnews.com 25 Oktober -	
15 November 2014	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Berita 1 Viva.co.id	107
Gambar 2 : Berita 2 Viva.co.id	107
Gambar 3 : Berita 3 Viva.co.id	108
Gambar 4 : Berita 4 Viva.co.id	108
Gambar 5 : Berita 5 Viva.co.id	109
Gambar 6 : Berita 6 Viva.co.id	109
Gambar 7 : Berita 1 Metrotvnews.com	110
Gambar 8 : Berita 2 Metrotvnews.com	110
Gambar 9 : Berita 3 Metrotvnews.com	111
Gambar 10 : Berita 4 Metrotvnews.com	111
Gambar 11 : Berita 5 Metrotvnews.com	112
Gambar 12 : Berita 6 Metrotvnews.com	112
Gambar 13 : Berita 7 Metrotvnews.com	113

ABSTRACT

The polemic of regional election bill became a topic of discussion for politician few times ago. The supporter and the rejecter group of regional election bill agreed to keep consistent on each other's politics attitude. Media which support those groups also involved in supporting them by publishing news that takes side to each group. Viva.co.id supported Merah Putih coalition (supporter of regional election bill), and Metrotvnews.com supported Indonesia Hebat coalition (rejecter of regional election bill). Two medias who in side with those two groups can be seen from the news on September 25th – October 15th 2014.

This research is aimed to know framing which is done by Viva.co.id and Metrotvnews.com. Researcher uses framing analysis unit William A. Gamson and Andre Modigliani model and Robert A. Dahl democracy theory. Analysis unit used in this research is framing devices (Metaphors, Clichéphrases, Exemplaar, Depiction, & Visual Images), and Reasoning Devices (Roots, Appeals to principle, & Consequences). While the analysis of democracy theory includes general election system (Proportional representative and First-Past-The-Post).

This research result found that framing which is done by Viva.co.id who supported regional election bill was because the leader of Viva.co.id involved in Merah Putih coalition. While Metrotvnews.com rejected regional election bill because Surya Paloh involved in Indonesia Hebat coalition. Every politician who has media tends to take the advantage of media to his own politic bussiness, also to build mass vigour to be consistent to their politic attitude.

Keywords : Framing, Media, News



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) 2014 telah selesai digelar. Terlepas dari berbagai keberhasilannya melakukan reformasi kepemimpinan nasional dan berbagai varian kesuksesan di bidang teknis, pemilu 2014 dianggap berhasil karena mampu dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pemilu 2014 berhasil membangun lapisan generasi baru dalam peta politik nasional. Nama Prabowo Subianto, Joko Widodo, Megawati, Basuki Tjahaja Purnama, Hatta Radjasa, Wiranto, dan beberapa tokoh lainnya merupakan sederet nama yang kehadirannya menjadi episentrum kontestasi politik tanah air. Keriuhan pesta demokrasi ini semakin menarik setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa kemenangan Joko Widodo adalah berkat media massa yang sempat menjadikannya sebagai *media darling*. Salah satunya Effendi Ghazali yang mengatakan bahwa popularitas Jokowi sangat diminati media di Indonesia (<http://metro.sindonews.com>). Joko Widodo mulai dikenal masyarakat

berkat prestasinya ketika memimpin Kota Solo dan terpilihnya menjadi gubernur DKI Jakarta.

Pada perjalanannya, dari proses pencalonan presiden sampai dengan keberhasilan meraih kemenangan, media massa mulai banyak menayangkan berita-berita pasangan calon sesuai pilihan politik pemilik media masing-masing. Beberapa tokoh politik yang *notabene* memiliki media dan terlibat dalam prosesi pemenangan kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden gencar melakukan penetrasi isu melalui media yang mereka pimpin. Sebagai contoh, Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar) adalah pemilik Viva Group meliputi TVOne, Viva.co.id dan Suara Karya. Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem) menjadi pemilik Media Group, yaitu MetroTV, Metrotvnews.com, Lampung Pos, dan Media Indonesia. Sementara Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group seperti RCTI, MNCTV, GlobalTV, Okezone.com dan Seputar Indonesia, juga tidak lepas dari dunia politik.

Keterlibatan tokoh politik dengan memanfaatkan media yang dimilikinya, sesungguhnya berangkat dari sebuah pemahaman tentang kuatnya media dalam mempengaruhi ruang kesadaran masyarakat. Burton (2008) menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan meskipun secara mengejutkan adalah sulit untuk menetapkan secara akurat kekuatan jenis apakah yang dimiliki oleh media. Kekuatan utama media terletak pada fakta bahwa media dapat menjadi sumber utama berbagai ide dan opini. Media dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak.

Berangkat dari motif ini, para pemilik media kemudian memanfaatkan media yang dimiliki untuk melancarkan kepentingan politiknya. Bahkan sampai saat ini beberapa media masih konsisten menjadi corong kedua kelompok tersebut. Misalnya Viva Group menjadi corong Koalisi Merah Putih dan Media Group menjadi corong Koalisi Indosia Hebat. Sebagai contoh keberpihakan kedua media tersebut adalah dalam polemik RUU (Rancangan Undang-Undang) PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada mulai menguat menjelang pilpres 9 Juli 2014. Munculnya pembahasan RUU tersebut lantaran ada insiatif untuk mengubah pilkada dari pilkada langsung ke pilkada tidak langsung dengan alasan yang beragam antara lain politik biaya tinggi dapat menghalangi munculnya calon berkualitas (<http://www.tempo.co>). Setidaknya ada dua kubu yang berseberangan, kubu pertama ingin tetap mempertahankan pilkada langsung dan kubu kedua ingin mengubah menjadi pilkada tidak langsung yang artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kubu pertama adalah koalisi pendukung pemerintah yaitu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu kedua adalah koalisi Koalisi Merah Putih (KMP). Hasilnya, dalam Sidang Paripurna DPR kubu kedua yang mendukung pilkada tidak langsung menang melalui voting. Namun, hasil sidang tersebut belum ditetapkan karena selang beberapa waktu kemudian Presiden Susilo Bambang Yodhoyono

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Penetapannya pun masih menunggu hasil sidang paripurna terkait Perppu.

Pemberitaan media terhadap isu pilkada ini tidak jauh berbeda dengan pemberitaan pada isu pilpres sebelumnya. Dua media besar Viva.co.id dan Metrotvnews.com memiliki cara pandang berbeda terhadap isu pilkada ini. Paling tidak, cara pandang pemberitaan tersebut dapat dilihat dari faktor kepemilikan media tersebut (seperti disebutkan di atas) oleh elite partai entah sebagai anggota KMP ataupun KIH. Viva.co.id merupakan milik Abu Rizal Bakrie yang bergabung dengan KMP, sedangkan Metrotvnews.com adalah milik Surya Paloh yang bergabung dengan KIH. Dari aspek kepemilikan ini sedikit banyak tentu berpengaruh terhadap pemberitaan media yang dimilikinya. Kedua media ini bisa menjadi corong artikulasi kepentingan dari masing-masing kubu. Dari sinilah urgensi untuk mengkaji independensi media di tengah kepentingan politik pemilik dan kondisi demokrasi di Indonesia menjadi relevan dihadirkan.

Dari pertautan kepentingan ini, berikut beberapa contoh judul pemberitaan yang disajikan oleh kedua media tersebut terkait isu pilkada. Metrotvnews.com tanggal 26 September 2014 membuat berita dengan judul “Pengamat : Demokrasi Disandera Oligarki Parpol”. Berikut kutipan berita tersebut :

“Para politikus dinilai tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan sistem pilkada oleh DPRD yang begitu besar. Sistem ini membatasi akses rakyat berpartisipasi dan mengontrol kekuasaan

karena pemilihan akan diwarnai transaksi kekuasaan antara politisi di parlemen dengan kandidat, tanpa bisa diawasi rakyat.

"Cara pemilihan lewat DPRD ini akan menyuburkan praktik korupsi. Dampaknya DPRD dan kepala daerah tidak menutup kemungkinan memanfaatkan APBD untuk ajang berburu rente," ujarnya."

Sedangkan Viva.co.id membuat berita tanggal 27 September dengan judul “Pakar Ilmu Politik : Pilkada Langsung Adalah Produk Demokrasi Impor”. Kedua berita ini sama-sama fakta, tentang pilkada, tetapi pemakaian frame yang berbeda dapat menggambarkan makna dan pesan yang berbeda pula. Berikut kutipan salah satu berita Viva.co.id :

"Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, menilai pemilihan umum kepala daerah langsung oleh rakyat selama beberapa tahun terakhir adalah salah satu bentuk dari demokrasi impor. Itu tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Menurutnya, sebagaimana layaknya produk impor, tidak semua produk cocok digunakan di Indonesia. "Pemilihan langsung mungkin cocok di negara lain seperti Amerika, tetapi tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia," katanya di Malang, Jawa Timur, Jumat, 26 September 2014."

Dalam Islam, penyebaran berita-berita yang belum tentu benar juga mendapatkan perhatian. Salah satunya saat istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah ra dituduh tanpa bukti telah menjalin hubungan mesra dengan seorang sahabat yang bernama Shafwan Ibn al-Mu'athhil as-Sulami oleh Seorang kaum munafik, Abdullah ibn Ubayy Ibn Salul pasca pertempuran Bani al-Mushthalaq (M. Quraish Shihab, t.t. : 294) . Berikut ayat yang turun setelah terjadi peristiwa tersebut :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَلْفَاظِ عُصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ أُمْرٍ يِمْتَهِنُهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنْ الْإِيمَانِ وَالَّذِي تَوَلَّ إِلَيْهِ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu meganggapnya buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kami. Tiap-tiap seseorang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu. Dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, baginya azab yang besar.*”(An-Nur : 11)

Perbedaan karakteristik dan cara menampilkan berita oleh kedua media tentang isu pilkada tersebut menarik peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam. Setidaknya, hal itu disebabkan oleh tiga hal : (1) keduanya adalah media terbesar di Indonesia, (2) dari segi kepemilikan kedua media ini dikuasai oleh elite politik yang sama-sama menjadi ketua partai dan berseberangan, yaitu Surya Paloh (Nasdem) dan Abu Rizal Bakrie (Golkar), dan (3) kedua media ini mencerminkan dua kubu politik yang berbeda yaitu KMP yang mendukung pilkada tidak langsung dan KIH yang mau mempertahankan pilkada langsung, paling tidak bila ditelusuri dari posisi politik pemiliknya: Surya Paloh sebagai anggota KIH dan ARB sebagai Anggota KMP. Atas dasar itulah, peneliti mengambil judul **“FRAMING MEDIA DALAM BERITA RUU PILKADA (Analisis *Framing William A. Gamson & Andre Modigliani* pada Berita RUU PILKADA di Media Online Viva.co.id dan Metrotvnews.com Periode 25 September – 15 Oktober 2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana *framing* media pada

pemberitaan RUU PILKADA di Media Online Viva.co.id & Metrotvnews.com Periode 25 – 15 Oktober 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *frame* media pada pemberitaan RUU PILKADA di Viva.co.id & Metrotvnews.com Periode 25 – 15 Oktober 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian lainnya, khususnya penelitian yang fokus kajian penelitiannya pada analisis framing dan sistem pemilu atau penelitian yang berkaitan dengan pemberitaan media online.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi kepada praktisi media, bagaimana kontruksi pesan yang dilakukan oleh media sehingga efek yang dihasilkan oleh khalayak sesuai dengan tujuan media.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca, bagaimana membungkai suatu fakta.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian merupakan landasan dari penelitian yang akan kita teliti. Penelitian yang akan dilakukan harus berdasar pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya, untuk memberikan perbandingan terkait penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat peneliti:

Pertama, skripsi Tanti Setyaningsih, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi tersebut berjudul “*Konstruksi Kepemimpinan JOKOWI di Media Cetak (Analisis Framing Pemberitaan pada Liputan Khusus Satu Tahun Kepemimpinan JOKOWI Sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi 14-18 Oktober 2013)*” .

Peneliti sebelumnya meletakkan fokus penelitiannya pada proses bagaimanakah konstruksi kepemimpinan Jokowi pada pemberitaan liputan khusus satu tahun kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada surat kabar harian Kompas edisi liputan khusus 14 - 18 Oktober 2013, dalam hal ini yang menjadi persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Analisis Framing. Namun dalam penelitiannya, peneliti sebelumnya menambahkan dengan beberapa konsep kepemimpinan sebagai pendukung teorinya. Persamaan lainnya yaitu penggunaan analisis, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan model Analisis

Framing Pan & Kosicki sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan model Gamson & Modigliani.

Kedua, skripsi Mega Firmawanti Lasinta, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi tersebut berjudul *Konstruksi Media Online Dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik (Analisis Framing Tempo.co. dan Viva.co.id dalam pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari – 31 Maret 2013)*.

Penelitian yang dilakukan juga menggunakan Analisis Framing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tempo.co dan Viva.co.id mengemas berita serta menganalisis konstruksi yang dilakukan kedua media tersebut. Hasil penelitiannya adalah Tempo.co dalam pemberitaannya lebih berpihak kepada PBB ketimbang KPU. Sedangkan Viva.co.id konstruksi pemberitaannya cenderung netral.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah pada tujuan penelitian. Peneliti sebelumnya hanya ingin mengetahui konstruksi berita yang dikemas oleh Tempo.co dan Viva.co.id dalam pemberitaan sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah ingin mengetahui konstruksi media dan kaitannya dengan realitas demokrasi di Indonesia.

Ketiga, skripsi Al.Vivi Purwito Sari, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2012. Skripsi tersebut berjudul *Analisis Framing Berita Headline Freeport di Harian Kompas*.

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui frame harian kompas terhadap pemberitaan Freeport. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan Analisis Framing Model Robert. N. Entman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harian kompas mengkonstruksi pemberitaan freeport berdasarkan dua isu yang ditonjolkan harian kompas yaitu aksi mogok pekerja Freeport dan peristiwa penembakan.

Keempat, skripsi Lidwina Chometa Halley Eprilianty, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Atma Jaya, Yogyakarta tahun 2009. Skripsi tersebut berjudul *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY*.

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui frame SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja dalam membungkai opini masyarakat mengenai polemik pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008-2013. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis framing model Pan & Kosicki. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua koran lokal tersebut cenderung pro penetapan Gubernur DIY. KR cenderung pro penetapan Gubernur DIY karena faktor ideologi media yang mengutamakan kepentingan publik, sedangkan Bernas Jogja lebih disebabkan prinsip medianya yang pro bisnis sehingga berita-berita polemik ditempatkan sebagai *headline* demi meraih keuntungan dan menarik pembaca.

Berikut perbedaan dan persamaan penelitian yang telah dilakukan dengan yang akan dilakukan :

Tabel 1

Penelitian yang Sudah Dilakukan.

	Subjek	Objek	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
Tanti Setyaningsih	Surat Kabar Harian <i>Kompas</i>	Berita Liputan Khusus Kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta	Dokumentasi	Deskriptif analisis dengan Framing model Pan dan Kosicki dan teori Kepemimpinan
Megafirmaw anti Lasinta	Tempo.co dan Viva.co.id	Berita Verikasi Partai Politik Partai Bulan bintang	Dokumentasi	Deskriptif kualitatif dengan Framing model Pan dan Kosicki dan Konstruksi Sosial
Al. Vivi Purwito Sari	Surat Kabar Harian <i>Kompas</i>	Pemberitaan Freeport	Dokumentasi & Kajian Pustaka	Deskriptif kualitatif dengan Framing model Robert N. Entman
Lidwina Chometa Halley Epriliyanty	Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja	Pemberitaan tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur DIY	Wawancara dan Dokumentasi	Deskriptif analisis dengan Framing model Pan dan Kosicki dan Konsep Opini dalam masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti

F. Landasan Teori

1. Konstruksi Sosial

Manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis. Masyarakat adalah produk dari manusia. Sebaliknya, manusia adalah produk dari masyarakat (Eriyanto, 2009 : 13-14). Cara pandang ini adalah merupakan konsep konstruktivisme yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan penelitiannya yang menghasilkan teori konstruksi sosial.

Dalam pandangan sosiologi dikenal dua teori, yaitu (1) Definisi Sosial yang disampaikan oleh Webber bahwa, tingkah laku manusia lah yang membentuk masyarakat. Manusia yang membentuk realitas. Semua aktifitas kesehariannya diperuntukkan kepada masyarakat. Dalam pandangan ini, Webber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Keduanya dianggap membantu membentuk tindakan manusia yang penuh arti dan penuh makna (Ritzer, 2011 : 37). (2) Fakta Sosial, yang dijelaskan Durkheim bahwa, manusia adalah produk dari masyarakat. Manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia bergantung dan ditentukan oleh masyarakat. Di antara kedua teori ini, Eriyanto (2009 : 13) mengatakan bahwa ada Teori Konstruksi Sosial yang belakangan dikenal memiliki analisis sendiri terhadap teks berita.

Secara umum, Teori Konstruksi Sosial berpandangan bahwa Manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis. Masyarakat

adalah produk dari manusia. Sebaliknya, manusia adalah produk dari masyarakat (Eriyanto, 2009 : 13-14). Cara pandang ini adalah merupakan konsep konstruktivisme yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan penelitiannya yang menghasilkan teori konstruksi sosial tersebut.

Proses dialektik yang terjadi dalam Teori Konstruksi Sosial antara manusia dan masyarakat terbentuk melalui tahapan *Eksternalisasi*, *Objektifikasi*, dan *Internalisasi*. Manusia akan beradaptasi (*eksternalisasi*) dengan dunia sosiokulturalnya, kemudian berinteraksi (*objektifikasi*), barulah kemudian terjadi *internalisasi* di mana manusia menjadi bagian dari lingkungan sosialnya (Tanti Setyaningsih, 2014 : 10)

Teori konstruksi sosial atas realita ini penting bagi peneliti yang ingin mempelajari efek-efek iklan, namun teori ini juga dapat diterapkan secara luas untuk mempelajari bagaimana media, khususnya berita media, membentuk relata politik. (Rom Harre dalam Morrisan, 2010 : 135)

2. Konstruksi Sosial Media Massa

Pada dasarnya, pekerjaan media massa adalah mengkonstruksi realitas. Isi media adalah hasil para pekerja mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, di antaranya realitas politik. Pada umumnya, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada

pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik (Hamad, 2004 : 16 - 25).

Pertama, pemilihan simbol politik. Dalam setiap pemberitaan politik simbol-simbol tertentu yang berkaitan turut diperhitungkan. Hasil data yang diterima pekerja media kemudian dikontruksi dengan memilih simbol-simbol tertentu untuk ditampilkan dalam berita. Pekerja media menentukan sendiri mana yang akan ditampilkan dan mana yang tidak.

Kedua, melakukan pembingkaian peristiwa politik. Sedikit media massa yang membuat berita dengan peristiwa secara utuh. Dengan keterbatasan kolom, halaman atau waktu. Peristiwa yang rumit, lebar, semuanya disederhanakan dengan membungkai fakta-fakta yang dianggap penting oleh media.

Ketiga, menyediakan ruang dan waktu untuk sebuah peristiwa politik. Masyarakat akan mengikuti semua perkembangan (isu) mengikuti apa yang banyak diberitakan oleh media. Semakin banyak porsi pemberitaan hal-hal tertentu, maka semakin banyak pula perhatian masyarakat. Besarnya perhatian masyarakat terhadap suatu isu bergantung kepada seberapa besar media perhatian media terhadap isu. Faktanya, jarang konsumen media memperbincangkan isu yang tidak dimuat oleh media.

3. Jurnalisme Online

Presiden Amerika Bill Clinton mengatakan : “Kita sedang bergerak maju dengan sangat cepat dalam semua jenis produksi dan layanan yang berdasarkan pengetahuan ekonomi - penghasilan anda bergantung pada apa yang anda pelajari. Tidak hanya pada apa yang anda ketahui hari ini, tetapi juga pada apa yang anda mampu pelajari pada esok hari.” Pidato tersebut menekankan bahwa Pengetahuan dan sumber daya informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang akan berhasil dalam dunia sekarang dan esok hari adalah masyarakat yang dapat menggunakan sumberdaya secara efektif, dan internet selalu siap membantu.

Reddick dan King mengatakan bahwa informasi yang menarik, tepat waktu dan cermat sangat penting untuk jurnalisme yang baik. Dalam seabad terakhir ini, pekerjaan seorang wartawan ditentukan oleh peluangnya mendapat informasi (Ardiant, 2009 : 154).

Keadaan ini menggambarkan bahwa jurnalisme yang cepat dan mutakhir dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Jurnalis diuntungkan karena akan lebih mudah menyebarkan informasi kepada berbagai orang karena geografis tidak lagi menjadi pembatas.

Berikut keunggulan jurnalisme online yang dipaparkan oleh James C Foust dalam bukunya, *online journalism: Principles and Practices of News for the Web* (2005) : 1) *Audience Control* (audiens lebih leluasa dalam memilih berita). 2) *Nonlinearity* (tiap berita yang

disampaikan dapat berdiri sendiri atau tidak berurutan). 3) *Storage and retrieval* (berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah). 4) *Unlimited Space* (memungkinkan jumlah berita jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya). 5) *Immediacy* (cepat dan langsung). 6) *Multimedia Capability* (bisa menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya). 7) *Interactivity* (memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca) (<http://www.republika.co.id>).

4. Analisis Framing

“apa yang diliput dan apa yang luput dari pemberitaan, apa yang ditonjolkan dan apa yang dilupakan dalam pemberitaan”. Kutipan dari tulisan Eriyanto (2009 : 2) dalam pemantik awal bukunya menunjukkan gambaran tentang framing media dalam setiap berita.

Menurut Sobur (2012), pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behaviour) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Berikut defenisi Framing menurut beberapa tokoh :

Tabel 2
Definisi Framing Menurut Beberapa Tokoh

Robert Etman	N.	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William Gamson	A.	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin		Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikiran rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow and Robert Benford		Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder		Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki		Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber : Eriyanto, 2009 : 68

Secara sederhana, framing adalah pembingkaian berita yang mencerminkan produk media sekaligus produk wartawan ketika harus mengidentifikasi dan mengklasifikasi serta kemudian menyampaikan informasi dan opini kepada khalayak.

Framing, menurut Entman, memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. *Frames*, menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Politisi mencari dukungan dengan memaksakan kompetisi satu sama lain. Mereka bersama jurnalis membangun frame berita. (Siahaan dalam Sobur, 2012 : 164).

Peneliti akan menggunakan analisis Framing model William A. Gamson & Andre Modigliani. Model ini, oleh peneliti, dianggap tepat jika dipakai untuk menganalisis berita RUU Pilkada. Karena dalam perkembangannya model framing jenis ini dipakai untuk menganalisis berita yang dapat menimbulkan bias atau konstruksi isu yang bermuara pada dua hal yang berbeda (Lihat contoh analisis Gamson dan Modigliani dalam Eriyanto, 2009 : 229). Dalam penelitian yang akan dilakukan juga tidak akan mengarahkan pembaca agar setuju atau tidak setuju kepada suatu hal. Soal sikap setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung adalah hal yang sekunder (Eriyanto, 2009 : 223). Analisis penelitian ini mengutamakan bagaimana pembingkaian yang dilakukan terhadap suatu berita dan penyajiannya kepada pembaca.

Ada dua perangkat yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani untuk membantu menganalisis (bahkan mengkonstruksi) kecenderungan posisi, kecenderungan politik, atau muatan-muatan

dalam suatu isu atau peristiwa. Perangkat tersebut dapat mengidentifikasi arah dan struktur wacana kepada ide sentral dalam sebuah berita (William A. Gamson & Andre Modigliani dalam Eriyanto, 2009 : 225).

Pertama, Framing Devices (Perangkat Framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu.

Kedua, Reasoning Devices (Perangkat Penalaran). Dalam sebuah gagasan dibutuhkan sebuah pemberian dan penalaran untuk membuat suatu berita menjadi tampak benar, dan absah. Hal ini dapat diwujudkan dengan menambahkan kalimat yang diperoleh dari sumber yang kredibel, atau mengaitkan dengan peristiwa yang telah lalu. Dari penyusunan kalimat, paragraf, atau proposisi tertentu dapat membuat pesan semakin tampak normal, wajar dan beralasan (Eriyanto, 2009 : 227).

5. Demokrasi

Eep Saefulloh Fatah (1994 : 5) menjelaskan bahwa demokrasi dapat ditelusuri ke masa-masa awal kemunculannya. Konsep demokrasi ini muncul pertama kali dalam praktik Negara-kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Pada tahun 431 SM, Pericles, Negarawan dari Athena mendefinisikan demokrasi dengan beberapa kriteria : (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang

penuh dan langsung; (2) Kesamaan di depan Hukum; (3) Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan : dan (4) Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. Beberapa Negarawan dan filsuf lain juga banyak yang mendefinisikan tentang demokrasi, seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya.

Pada masa *renaissance*, demokrasi semakin ramai diperbincangkan dan semakin luas cakupannya. Beberapa contohnya yaitu mucul pemikir-pemikir besar tentang kekuasaan dan Negara seperti Machiavelli, tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan JJ. Roesseau sekaligus memberikan perluasan dalam kajian tentang demokrasi dan memberikan gambaran bahwa dalam perkembangannya demokrasi akan mendapatkan tambahan-tambahan definisi aktual.

Seiring perkembangannya, demokrasi mengalami sebuah paradoks. Di satu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang kompetisi dan berkonflik namun di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus. Iswandi Syahputra menambahkan (2013 : 1) bahwa Demokrasi memberikan cara manusia untuk mempertahankan eksistensinya, eksistensi untuk bertahan, diakui, dan berkontribusi. Demokrasi juga mengajarkan cara elegan dan egaliter dengan penguasaan sejumlah aset sosial yang bersifat mengatur. Demokrasi juga memberikan ruang yang besar bagi media

massa untuk berperan. Apalagi media massa sudah menjadi pilar keempat yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik saat eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak mampu mengartikulasikannya (Fajar Junaedi, 2013 : 49).

Di situlah kemudian akan sangat rentan timbulnya konflik, baik horisontal dan vertikal. Namun biasanya konflik tersebut sulit ditebak, apakah yang terjadi memang benar-benar konflik atau dibuat-buat untuk menenggelamkan persoalan yang lain, atau yang lainnya. Misalnya dalam beberapa peristiwa yang terjadi di medio akhir 2014, tentang Polemik RUU PILKADA. Peta politik di parlemen terpecah menjadi dua. *Pertama*, Pro UU PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung). *Kedua*, Kontra UU PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung).

- **Sistem Pemilihan Umum**

Robert A. Dahl (2001 : 132) mengatakan bahwa setiap warga Negara harus memiliki sebuah kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih, dan semua suara pemilih harus dihitung sama. Pemilu yang dilaksanakan harus berjalan bebas dan adil. Bebas adalah semua warga Negara mendatangi tempat pemungutan suara tanpa rasa takut akan intimidasi dari pihak manapun. Namun persoalan yang terjadi sampai sekarang adalah tidaklah jelas cara terbaik untuk melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Robert A. Dahl (2001 : 181) menambahkan bahwa tidak ada satupun sistem pemilihan yang dapat memenuhi kriteria yang diharapkan, karena sistem pemilu sangat bervariasi. Jika suatu Negara mengambil satu sistem pemilu tertentu, maka Negara tersebut akan mendapatkan nilai berharga dari sistem lainnya.

Berikut dua contoh sistem pemilu yang dikemukakan Dahl:

Pertama, Sistem Perwakilan Proporsional (PP) yang digunakan beberapa Negara Eropa dan Amerika Latin. Dalam sistem ini warga Negara tidak berhak menyatakan pendapat secara langsung atau tidak memiliki hak suara penuh melainkan diwakilkan oleh legislator yang dipilih dari *distrik* masing-masing.

Kedua, First-Past-The-Post (FPTP). Masing-masing warga memiliki hak untuk menyatakan pendapat atau memiliki hak suara. Sistem ini dapat menghilangkan suara minoritas, sebagai contoh di Amerika. Sistem FPTP (First-Past-The-Post) menghilangkan suara orang Afrika-Amerika dari perwakilan yang adil dalam badan legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada dasarnya Dahl menjelaskan tidak begitu *rigid* tentang Demokrasi yang ideal. Namun ia memberikan gambaran-gambaran tentang demokrasi. Dari dua sistem tersebut di atas ia juga menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika memakai sistem PP (Perwakilan Proporsional) maka partai mayoritas akan unggul. Sebaliknya jika memakai sistem FPTP

(Firs-Past-The-Post) maka minoritas bisa diunggulkan bahkan bisa dilemahkan.

G. Unit Analisis

Di bawah ini perangkat framing model William A. Gamson & Andre Modigliani :

Framing dipahami sebagai ide sentral (Element Inti Berita) ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral (Elemen Inti Berita) ini, akan didukung oleh wacana lain sehingga satu bagian wacana dengan bagian lain saling kohesif – saling mendukung. Perangkat pendukung ide sentral (Elemen Inti Berita) tersebut adalah *Framing Device*; Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik, gambar, dan metafora. *Reasoning Device* ; Gagasan tidak hanya berisi kalimat, gagasan selalu ditandai oleh dasar pemberar tertentu, alasan tertentu agar khalayak menerima, mengikuti, dan membenarkan apa yang disampaikan. Ide sentral yang dimaksud dibuat sedemikian rupa sehingga tampak wajar dan beralasan (Eriyanto, 2009 : 226 - 227).

Tabel 3
Perangkat Framing Gamson & Modigliani

Frame	
Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is at issues	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methapors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisis kausal atau sebab akibat
Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	Appeals to principle Premis dasar, klaim-klaim moral
Exemplaar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai	Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai
Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu	
Visual Images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.	

Sumber : Eriyanto, 2009 : 225.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian jenis ini mengutamakan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. (Kriyantono, 2009 : 56). Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan yaitu deskriptif. Menurut Kriyantono, penelitian dengan jenis deksriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. (Kriyantono, 2009 : 67).

Penelitian yang dilakukan ini berusaha menggambarkan bagaimana framing media pada Berita RUU Pilkada di media online Viva.co.id dan Metrotvnews.com periode 25 September - 15 Oktober 2014.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Media Online Metrotvnews.com dan Viva.co.id.

3. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang menjadi sasaran penelitian (Bungin, 2007 : 76). Objek dalam penelitian ini adalah teks berita RUU

Pilkada di media online Viva.co.id dan Metrotvnews.com periode 25 September - 15 Oktober 2014.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong (2005 : 157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (sumber tertulis), foto dan lain-lain. Sementara menurut Susanto, dokumentasi adalah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen (Susanto, 2006 : 136). Adapun penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi.

Dalam penelitian ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Bungin, sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2001 : 129). Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah teks berita RUU Pilkada di media online Viva.co.id dan Metrotvnews.com tanggal 25 September – 15 Oktober 2014. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang mendukung penelitian yaitu berupa buku-buku yang menunjang dengan kajian penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan landasan teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menganalisa proses berlangsungnya fenomena sosial agar dapat memperoleh gambaran yang tuntas terhadap fenomena tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses fenomena sosial itu (Bungin, 2007 : 153).

Menurut Hamidi, analisis data kualitatif dilakukan sejak awal turun ke lokasi melaksanakan pengumpulan data, dengan cara “mengansur atau menabung” informasi, kemudian mereduksi data, lalu mengelompokkan data, dan seterusnya sampai pada tahap terakhir memberikan interpretasi (Hamidi dalam Susanto, 2006 : 142).

Miles dan Huberman (1992 : 16 - 21) menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Dalam hal ini peneliti menyeleksi data yang sudah didapat kemudian memilih data yang dipakai dan dibuang sesuai dengan

kriteria yang sudah ditetukan oleh peneliti. *Pertama*, isi berita adalah tentang RUU PILKADA. *Kedua*, berita yang akan diambil adalah *Straight News*. *Ketiga*, dipublikasikan sejak hari dimulainya sidang RUU PILKADA sampai dua puluh hari berselang. *Keempat*, memiliki keterkaitan khusus dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.

b. Penyajian Data

Setelah selesai mereduksi data maka peneliti menyajikan data dengan menggunakan perangkat analisis framing model William A. Ghason dan Andre Modigliani.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan. Kemudian kesimpulan-kesimpulan yang didapat selanjutnya diverifikasi selama penelitian berlangsung.

6. Metode Keabsahan Data

Uji keabsahan data penting dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak diragukan kebenarannya. Uji keabsahan data ini diperoleh melalui triangulasi. Moleong menjelaskan triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk dijadikan pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005 : 330)

Denzin (1978) dalam Moleong (2005 : 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. *Pertama*, Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2010 : 330). *Kedua* Triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2005 : 331), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Teknik triangulasi jenis ketiga ini adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan hasil kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelempengan dalam

pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.

Keempat Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2005 : 331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan menguraikan pola, hubungan dan juga menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema ataupun penjelasan pembanding. Dwidjowinoto dalam Kriyantono (2009 : 70), menjelaskan, triangulasi sumber adalah membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka pembingkaian yang dilakukan oleh Viva.co.id dan Metrotvnews.com adalah sebagai berikut :

1. *Frame* yang dikembangkan oleh Viva.co.id melalui *Framing Device* (*Methapors, Catchphrases, Exemplaar, Depiction* dan *Visual Images*) dan *Reasoning Device* (*Roots, Appeals to Principle*, dan *Consequences*) mengenai pemberitaan RUU Pilkada adalah menekankan bahwa RUU Pilkada yang berimplikasi kepada pemilihan kepala daerah secara langsung adalah benar, dan harus didukung untuk diterapkan di Indonesia.
2. *Frame* yang dikembangkan oleh Metrotvnews.com melalui *Framing Devices* (*Methapors, Catchphrases, Exemplaar, Depiction* dan *Visual Images*) dan *Reasoning Device* (*Roots, Appeals to Principle*, dan *Consequences*) adalah menekankan bahwa RUU Pilkada harus ditolak karena mengakibatkan kemunduran demokrasi bagi Indonesia.

Viva.co.id cenderung mengarahkan berita pengesahan RUU Pilkada ke arah yang positif. Sedangkan Metrotvnews.com cenderung mengarahkan berita pengesahan RUU Pilkada ke arah yang negatif.

B. SARAN

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang akan melakukan penelitian tentang sistem pemilihan umum, politik, komunikasi, dan media. Berikut saran dari peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya :

1. Media massa seharusnya tidak mengedepankan kepentingan pemilik media, dan mampu bersikap netral dalam menyampaikan berita.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian komunikasi dengan model analisis framing maka peneliti harus memperhatikan kejemuhan yang akan dialami karena peneliti akan mengalami pengulangan-pengulangan pada beberapa bagian.

DAFTAR PUSTAKA

Tafsir Al-Quran

Shihab, M. Quraish. t.t. *Tafsir AL-Mishbah (Volume 9)*. Jakarta : Lentera Hati

Buku

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Bidang Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi Di Balik Media*. J alasutra: Yogyakarta
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi* (A. Rahman Zainuddin. Terjemahan). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Elvinaro, dkk. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media
- Eriyanto. 2009. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKiS.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indah
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Granit
- Junaedi, Fajar. 2013. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta : Buku Litera
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Riset Komunikasi: Dissertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Tjetjep Rohendi Rohidi. Terjemahan). Jakarta : UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Morissan. 2010. *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya dan Masyarakat*. Bogor : GhaliaIndonesia
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Drs. Alimandan. Terjemahan). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
- Syahputra, Iswandi. 2013. *Rezim Media*. Jakarta : Gramedia

Skripsi

- Erpilianty, Lidwina Chometa Halley. 2009. "Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Lasinta, Mega Firmawanti. 2014. "Konstruksi Media Online Dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik (Analisis Framing Tempo.co. dan Viva.co.id dalam

- pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari – 31 Maret 2013”.
- Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Sari, Al.Vivi Purwito. 2012. “Analisis Framing Berita Headline Freeport di Harian Kompas”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar
- Setyaningsih, Tanti. 2014. “Konstruksi Kepemimpinan JOKOWI di Media Cetak (Analisis Framing Pemberitaan pada Liputan Khusus Satu Tahun Kepemimpinan JOKOWI Sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi 14-18 Oktober 2013)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Jurnal

- Amin Purba. Juni 2006. “Perkembangan Kehidupan Pers dari Masa Rezim Orde Baru ke Masa Rezim Reformasi”. Jurnal Wawasan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Hal. 40-46

Internet

- <http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/26/297198/pengamat-demokrasi-disandera-oligarki-parpol>
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/542411-pakar-ilmu-politik--pilkada-langsung-adalah-produk-demokrasi-impor>
- <http://metro.sindonews.com/read/725830/31/biarkan-jokowi-jadi-media-darling-1362915724> diunduh pada
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/28/078610383/5-Argumen-DPR-Soal-Pilkada-DPRD-yang-Terbantahkan>
- <http://news.detik.com/read/2014/09/05/134718/2682338/10/refly-harun-mentahkan-koalisi-merah-putih-soal-pilkada-melalui-dprd>
- <http://www.rumahpemilu.org/in/read/148/Rancangan-Undang-Undang-tentang-Pemilihan-Kepala-Daerah>
- <http://www.vivagroup.co.id/wp-content/uploads/Annual-Report-VIVA-2014.pdf>
- <http://sir.stikom.edu/321/7/BAB%20IV.pdf>
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-yaserdwya-24311-1-unikom_y-1.pdf
- <http://www.republika.co.id/berita/rol-to-campus/uin-sunan-gunung-djati/12/10/22/mcap54-jurnalisme-online-jadi-primadona>
- <http://news.detik.com/read/2014/09/05/134718/2682338/10/2/refly-harun-mentahkan-koalisi-merah-putih-soal-pilkada-melalui-dprd>
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/541848-bagi-prabowo-ruu-pilkada-terkait-ideologi-bangsa>
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/541721-ppp-usulkan-moratorium-pilkada-langsung>
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/542297-ruu-pilkada-kado-terindah-untuk-jokowi>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/542411-pakar-ilmu-politik--pilkada-langsung-adalah-produk-demokrasi-impor>
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/542584-uu-pilkada-disahkan--pelaku-survei-terancam-gulung-tikar>
<http://politik.news.viva.co.id/news/read/544820-gerindra--pengesahan-uu-pilkada-bukan-sebuah-kemenangan>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/25/296647/8203-potensi-korupsi-pilkada-langsung-cuma-petty-corruption>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/25/296803/8203-ini-alasan-kpk-tolak-pilkada-tak-langsung>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/26/297129/pilkada-lewat-dprd-picu-korupsi-lebih-besar>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/26/297202/koalisi-merah-putih-dianggap-bajak-suara-rakyat>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/26/297198/pengamat-demokrasi-disandera-oligarki-parpol>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/26/297065/sby-jangan-ada-kemunduran-demokrasi>
<http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/14/304791/demonstran-uu-pilkada-tuntut-dpr-minta-maaf>

LAMPIRAN

Gambar 1

Berita 1 Viva.co.id



Sumber : <http://politik.news.viva.co.id>

Gambar 2

Berita 2 Viva.co.id



Sumber : <http://politik.news.viva.co.id>

Gambar 3

Berita 3 Viva.co.id



Sumber : <http://politik.news.viva.co.id>

Gambar 4

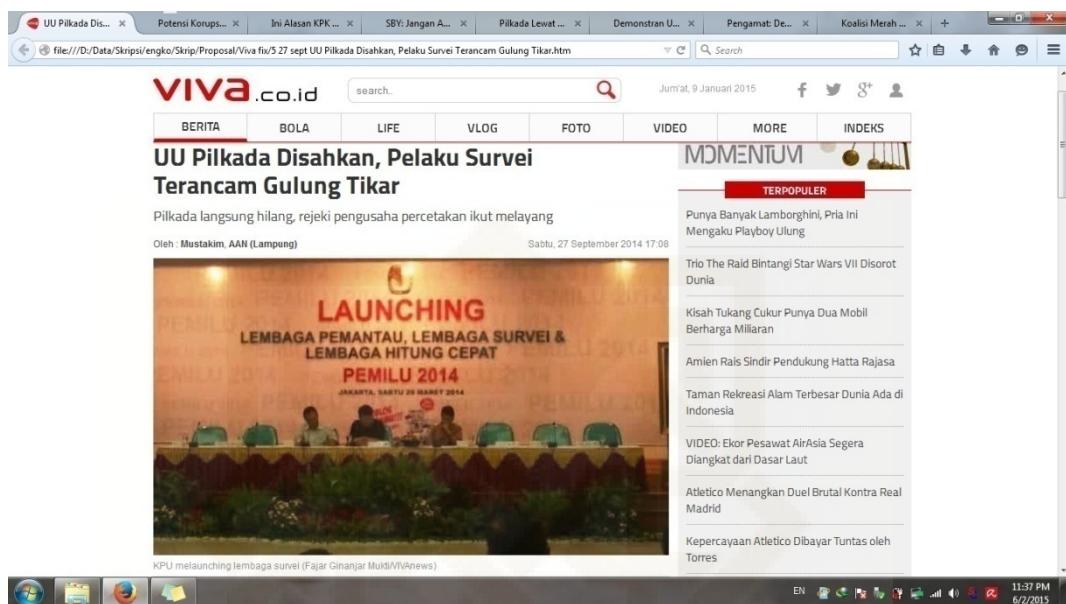
Berita 4 Viva.co.id



Sumber : <http://politik.news.viva.co.id>

Gambar 5

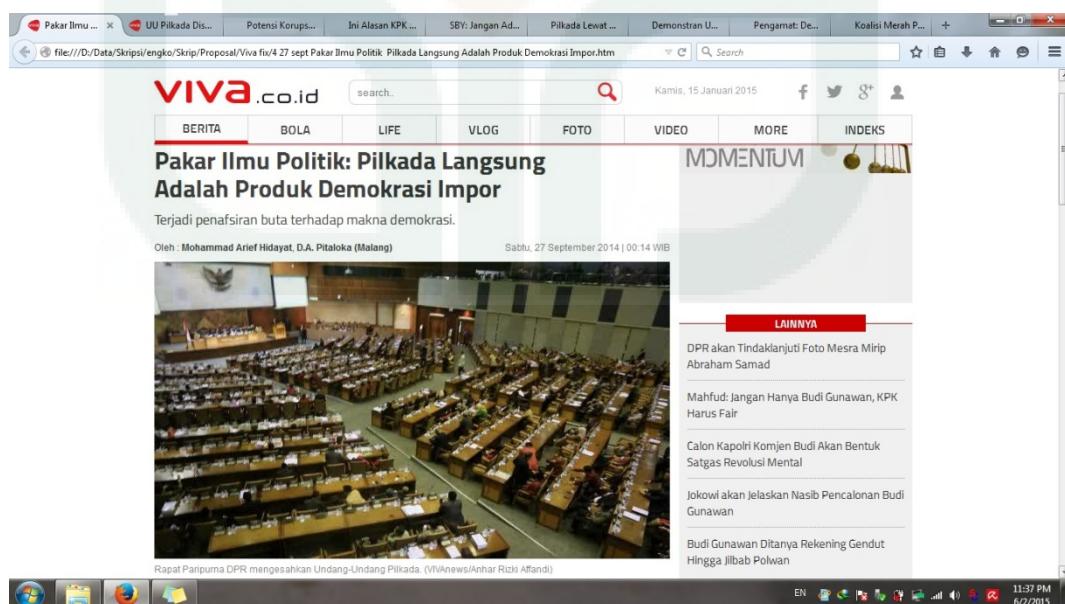
Berita 5 Viva.co.id



Sumber : <http://nasional.news.viva.co.id>

Gambar 6

Berita 6 Viva.co.id



Sumber : <http://politik.news.viva.co.id>

Gambar 7

Berita 1 Metrotvnews.com



Sumber berita : <http://news.metrotvnews.com>

Gambar 8

Berita 2 Metrotvnews.com



Sumber : <http://news.metrotvnews.com>

Gambar 9

Berita 3 Metrotvnews.com



Sumber : <http://news.metrotvnews.com>

Gambar 10

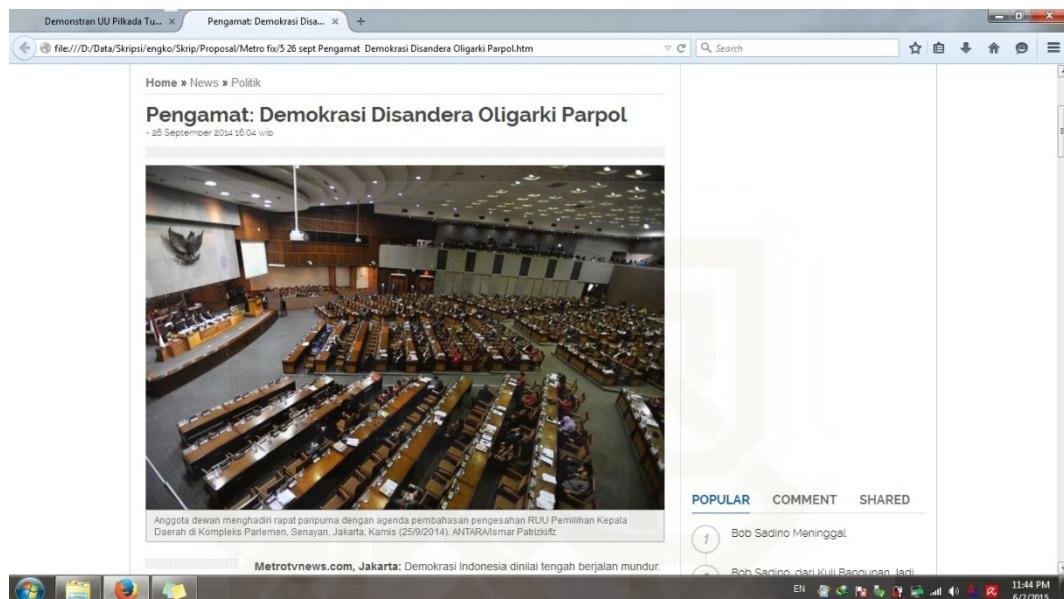
Berita 4 Metrotvnews.com



Sumber : <http://news.metrotvnews.com>

Gambar 11

Berita 5 Metrotvnews.com



Sumber : <http://news.metrotvnews.com>

Gambar 12

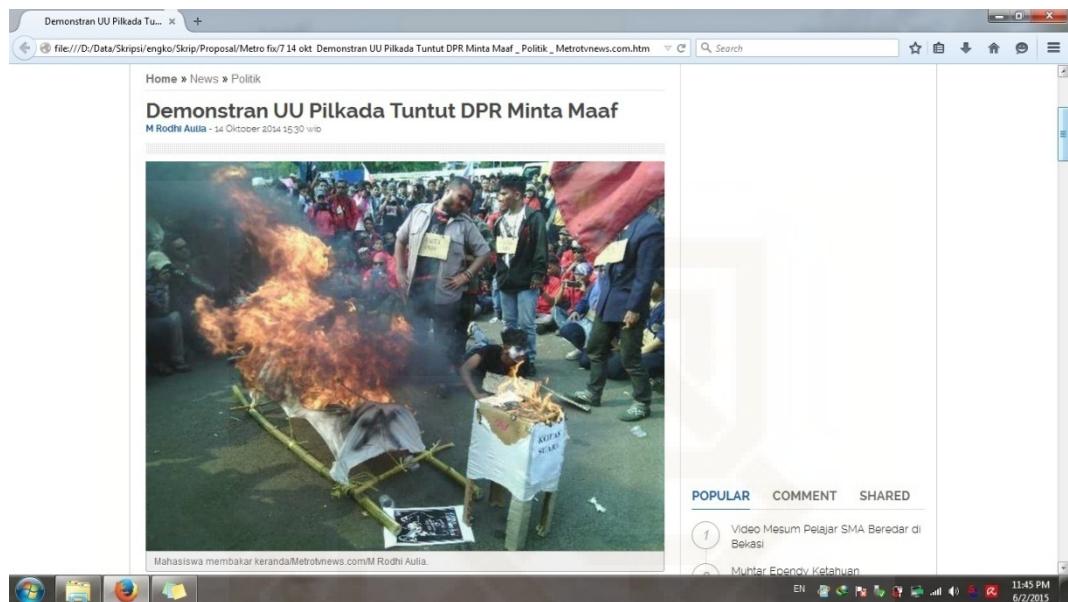
Berita 6 Metrotvnews.com



Sumber : <http://news.metrotvnews.com>

Gambar 13

Berita 7 Metrotvnews.com



Sumber : <http://news.metrotvnews.com>

Tabel 20
Daftar Berita RUU Pilkada Viva.co.id 25 Oktober - 15 November 2014

No	Judul Berita	Topik	Tanggal	Keterangan
1	Bagi Prabowo, RUU Pilkada Terkait Ideologi Bangsa	RUU Pilkada	25 September 2014	Dimasukkan
2	Demo Pilkada Ricuh, Satu Petugas Terluka	Demonstrasi	25 September 2014	Tidak dimasukkan
3	Dua Kubu di Internal PPP Dukung Pilkada Melalui DPRD	PPP	25 September 2014	Tidak dimasukkan
4	Ini Enam Poin Krisial RUU Pilkada	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
5	Ini Kronologi Demo RUU Pilkada yang Lukai Aparat	Demonstrasi	25 September 2014	Tidak dimasukkan
6	Jokowi Pilkada Bukan Semata Soal Biaya	Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
7	Jokowi Pilkada Lewat DPRD Belum Tentu Hemat	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
8	Kader Dukung Pilkada Langsung, PPP Siapkan Sanksi	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
9	Lewat Tenggat Skors, Rapat RUU Pilkada ‘Ngaret’	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
10	Mendagri Ada Hubungan Antara Pilkada Langsung dengan Korupsi	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
11	Peta Kekuatan GTerkinini Jelang Pengesahan RUU Pilkada	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
12	PPP Beberkan 9 Ekses Buruk Pilkada Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
13	PPP Usulkan Moratorium Pilkada Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Dimasukkan
14	Semua Fraksi di DPR Bersiap Sahkan UU Pilkada	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
15	Skenario Voting RUU Pilkada	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
16	Tolak RUU Pilkada,	RUU Pilkada	25 September	Tidak

	Pendemo Bakar Ban di Depan Gedung DPR		2014	dimasukkan
17	DPR Sahkan Pilkada Tak Langsung, Ini Respons Daerah	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
18	Ini Tahapan Uji Publik dalam RUU Pilkada Tidak Langsung	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
19	Jokowi Catat Partai Yang Rebut Hak Politik Rakyat	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
20	Kepala Daerah di DIY Beda Pendapat Soal Pilkada	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
21	KPK Pilkada Tak Langsung, Potensi Korupsi Sistematis	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
22	LSI Pilkada Langsung Dihilangkan, Anak Kandung Reformasi Dibunuh	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
23	Mahasiswa UIN Pilkada Lewat DPRD Cederai Reformasi	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
24	Main Uang di Pilkada Tak Langsung, Ini Sanksinya	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
25	MK Diprediksi Akan Batalkan Pilkada Tak Langsung	RUU PIlkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
26	Pengamat : SBY dan Demokrat Tak Bisa Gugat UU Pilkada	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
27	Pengamat UU Pilkada Blunder Terbesar Pemerintahan SBY	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
28	Pilkada Lewat DPRD, SBY Saya Kecewa	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
29	Pilkada Tak Lagi Langsung, Fungsi KPU Dipangkas	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
30	Pilkada Tak Langsung di Bantul Untuk Putus Politik Dinasti	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
31	RUU Pilkada Kado Terindah Untuk Jokowi	RUU Pilkada	26 September 2014	Dimasukkan

32	Tim Transisi Jokowi Kecewa Pilkada Jadi Tak Langsung	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
33	Wali Kota Akan Gugat UU Pilkada ke MK	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak dimasukkan
34	Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Ini Komentar Jimly	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
35	Pakar Ilmu Politik Pilkada Langsung Adalah Produk Demokrasi Impor	RUU Pilkada	27 September 2014	Dimasukkan
36	Alasan Kader Demokrat dan Golkar yang Pilih Pilkada Langsung	Kader Demokrat & Golkar	27 September 2014	Tidak dimasukkan
37	Alasan Kader Golkar Membangkang Saat Paripurna Pilkada	Kader Golkar	27 September 2014	Tidak dimasukkan
38	Ancaman Aktivis 98 pada Jokowi	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
39	Jokowi : Jika Gugatan UU Pilkada Kalah, Aktivis 98 Saya Undang Demo	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
40	Pendukung Jokowi Akan Serahkan Penghargaan Untuk SBY	SBY	27 September 2014	Tidak dimasukkan
41	Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Bupati Tanggerang Kecewa	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
42	Pilkada Dikembalikan ke DPRD, SBY : Rakyat Dikemanakan	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
43	Pilkada Oleh DPRD, Calon Bupati Independen di NTT Kebingungan	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
44	Pilkada Tak Langsung, Jadikan Kepala Daerah Tukang Suruh	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
45	Politikus PDIP Pertanyakan Kekecewaan SBY Soal UU Pilkada	SBY	27 September 2014	Tidak dimasukkan
46	Politisi Golkar Tak Diteken SBY pun UU Pilkada Tetap Berlaku	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
47	RUU Pilkada Disahkan, KPU Kami Tak Boleh	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan

	Protes-protes			
48	SBY Didemo Warga Indonesia di AS	SBY	27 September 2014	Tidak dimasukkan
49	UU Pilkada Disahkan, Pelaku Survei Terancam Gulung Tikar	RUU Pilkada	27 September 2014	Dimasukkan
50	Tempat Pengumpulan Fotokopi KTP untuk Gugat UU Pilkada	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
51	Tolak UU Pilkada, LSM Kumpulkan Fotokopi KTP Warga	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
52	Wakil Walikota Depok: Pilkada Tak Langsung Timbulkan Tirani	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak dimasukkan
53	Alasan Ketua Fraksi Demokrat Perintahkan Walkout	Demokrat	29 September 2014	Tidak dimasukkan
54	Demo Protes UU Pilkada, Mahasiswa Bawa Pocong	Demonstrasi	29 September 2014	Tidak dimasukkan
55	Di Osaka, SBY Telepon Ketua MK Konsultasi UU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
56	DPD RI Akan Gugat UU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
57	Gugat UU Pilkada, PAN Minta SBY Tak Gunakan Kekuasaan	SBY	29 September 2014	Tidak dimasukkan
58	Gugatan Ditolak, PDIP Ayo Kuat-kuatan	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
59	Hamdan Zoelva Akui Ditelepon SBY Soal UU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
60	IndoBarometer Meski Pilkada oleh DPRD, Survei Masih Diperlukan	Survei	29 September 2014	Tidak dimasukkan
61	Ipar SBY Sesalkan Sikap PDIP di Paripurna RUU Pilkada	PDIP	29 September 2014	Tidak dimasukkan
62	JK : Pilkada Tak Langsung Kepala Daerah Akan Goyah	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
63	JK : SBY Tak Bisa Gugat UU Pilkada	SBY	29 September 2014	Tidak dimasukkan

64	Jokowi Akan Dorong Masyarakat Gugat UU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	
65	Ketua Fraksi Demokrat Walkout Keputusan Saya, Bukan SBY	Demokrat	29 September 2014	Tidak dimasukkan
66	Mendagri Tak Menduga Pilkada Tidak Langsung Disahkan DPR	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
67	Nurhayati : PDIP dan Koalisinya Kenapa Nggak Ikut Walk Out	PDIP	29 September 2014	Tidak dimasukkan
68	Pilkada Oleh DPRD, Bisnis Survei Mengkerut	Bisnis	29 September 2014	Tidak dimasukkan
69	Politisi PDIP : SBY Bisa Keluarkan Perppu Batalkan UU Pilkada	Perppu	29 September 2014	Tidak dimasukkan
70	Syarief Hasan : SBY Dilaporkan Setelah Aksi Walk Out	SBY	29 September 2014	Tidak dimasukkan
71	Syarief Hasan : Walk Out Karena Tak Satupun Fraksi Mendukung	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak dimasukkan
72	Berencana Buat Perppu, Gerindra : SBY Akan Panen Kecaman	SBY	30 September 2014	Tidak dimasukkan
73	Demokrat Minta Aksi Walk Out Fraksinya Tak Dibesar-besarkan	Demokrat	30 September 2014	Tidak dimasukkan
74	Demokrat : Perppu UU Pilkada Bukan Untuk Perbaiki Citra SBY	SBY	30 September 2014	Tidak dimasukkan
75	Demokrat : SBY Tak Perlu Keluarkan Perppu UU Pilkada	SBY	30 September 2014	Tidak dimasukkan
76	LSN : Pilkada oleh DPRD, Konsultan Politik Habis	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
77	Mahfud MD : Saran Yusril Berbahaya	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
78	PSHK : SBY Tak Pernah Keberatan Pilkada Lewat DPRD	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
79	Relawan Jokowi Demo SBY	Demonstrasi	30 September 2014	Tidak dimasukkan

80	Relawan Jokowi Gelari SBY Bapak Anti-Demokrasi	SBY	30 September 2014	Tidak dimasukkan
81	SBY Akan Terbitkan Perppu Pilkada	Perppu	30 September 2014	Tidak dimasukkan
82	SBY Cari Cara Kembalikan Pilkada Langsung	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
83	SBY Pertimbangkan Saran Yusril, Tak Tandatangani RUU Pilkada	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
84	SBY Terbitkan Perppu UU Pilkada, Ini Reaksi Jokowi	Perppu	30 September 2014	Tidak dimasukkan
85	UU Pilkada, SBY Minta Penjelasan Dari Demokrat	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
86	Yusril Usul SBY dan Jokowi Tak Usah Tandatangani RUU Pilkada	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak dimasukkan
87	Chairul Tanjung : Jika Perppu Ditolak, Selanjutnya Tergantung PDIP	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
88	Dihujat Soal UU Pilkada, SBY Tekanan Batin	SBY	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
89	Gejolak Politik RI Belum Pengaruhi Bisnis Properti	Bisnis	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
90	Pilih Pilkada Langsung, Ketua DPD Golkar Jatim Dicopot	RUU Pilkada	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
91	Polititsi PKS : Tak Masalah SBY Keluarkan Perppu Pilkada	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
92	Sekjen PDIP : Bos Kami Sudah Ketemu SBY	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
93	Sekjen PDIP : Perppu Pilkada Sudah Dibahas SBY dan Bos	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
94	Surya Paloh : Kenapa Harus Ada Perppu Pilkada	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
95	Syarief Hasan : SBY Masih Siapakan Perppu	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan

	Pilkada			
96	Wakil Ketua DPR : Perppu Diterbitkan SBY Tak Lazim	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
97	Anggota DPR : Perppu Pilkada SBY Memang Untuk Rakyat atau Pencitraan?	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
98	Hanura : Perppu Pilkada Cuma Kuras Tenaga	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
99	Ibas : Kita Harus Berpikir Positif Soal Perppu Pilkada	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
100	Kata SBY Soal Perppu Dianggap Genting	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
101	SBY : Dua Perppu ini Bentuk Perjuangan Saya	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
102	SBY Keluarkan Perppu Pilkada, Jokowi : Pandangan Kami Sama	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
103	SBY Wajar Rakyat Marah Karena Pilkada Tak Langsung	RUU Pilkada	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
104	Setelah Dilantik, Jokowi Janji Perjuangkan Pilkada Langsung	RUU Pilkada	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
105	Tolak UU Pilkada, SBY Siapkan Dua Perppu	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
106	Bisnis Pilkada Terancam	Bisnis	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
107	Demokrat : Kenapa yang Walk Out Kemaren Tak Disalahkan?	Demokrat	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
108	Demokrat Yakin Perppu Pilkada Akan Disetujui DPR	Demokrat	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
109	DPR Akan Pertanyakan Perppu Pilkada	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
110	Golkar Perppu di DPR, SBY Lobi Partai-partai	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
112	Ini Masukan KPU Untuk SBY Terkait Perppu Pilkada Langsung	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
113	Ini Poin Penting Perppu Pilkada yang Baru	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan

	Diteken SBY			
114	Jokowi : Demokrasi Hilang, Bagaimana Rakyat Tidak Mengamuk	RUU Pilkada	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
115	Perppu Pilkada Selamatkan Muka SBY	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
116	Puan : Tak Ada Ruang Lagi Bagi Kami	RUU Pilkada	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
117	SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Apa Reaksi Mendagri?	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
118	Soal Perppu Pilkada, Jokowi Minta Elit Politik Tak Saling Jegal	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
119	Gerindra : Pengesahan UU Pilkada Bukan Sebuah Kemenangan	RUU Pilkada	4 Oktober 2014	Dimasukkan
120	Gerindra : Perppu Pilkada Akan Jadi Beban SBY	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
121	Jimly : RUU Pilkada Korban Pertarungan Nafsu Dua Kelompok	RUU Pilkada	4 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
121	Ruhut : SBY Tak Main-main Terbitkan Perppu Pilkada	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
123	Jimly : Terbitkan Perppu, SBY Ingin Perlihatkan Kesungguhan	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
124	Golkar : DPR Masih Kaji Perppu Pilkada	Perppu	5 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
125	PKB Belum Bersikap Menerima atau Menolak Perppu Pilkada	Perppu	5 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
126	Demokrat Golkar Perppu Pilkada Langsung, Perlu Peran PDIP	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
127	Ketua DPR : Belum ada Perppu Pilkada di Meja Saya	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
128	Lobi Politik SBY di Balik Lahirnya Perppu Pilkada Langsung	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
129	SBY Keluarkan Perppu, MK tetap Proses Gugatan	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak dimasukkan

	UU Pilkada			
130	DPR Sudah Terima Perppu Pilkada dari SBY	Perppu	8 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
131	Menlu: UU Pilkada Mestinya Tak Buat LSM Kucilkan Diri	RUU Pilkada	10 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
132	SBY Singgung Perppu Pilkada di Bali Democracy Forum	Perppu	10 Oktober 2014	Tidak dimasukkan
133	Poin Perbaikan UU Pilkada yang Ada di Perppu	Perppu	10 Oktober 2014	Tidak dimasukkan

Sumber : Olahan Peneliti

Tabel 21

Daftar Berita RUU Pilkada Metrotvnews.com 25 Oktober - 15 November 2014

No	Judul Berita	Topik	Tanggal	Keterangan
1	Mbalelo Soal RUU Pilkada, Kader Golkar Bakal Disanksi	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak dimasukkan
2	Gerindra : RUU Pilkada Revolusi Mental Bagi Masyarakat	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
3	Ini Alasan KPK Tolak Pilkada Tidak Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Dimasukkan
4	Potensi Korupsi Pilkada Lnagsung Cuma Petty Corruption	RUU Pilkada	25 September 2014	Dimasukkan
5	Ruhut Yakin Fraksi Demokrat Kompak Dukung Pilkada Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
6	Ada Loncatan Kesimpulan Dalam RUU Pilkada	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
7	Ah, Pendemo Pro Pilkada Tak Langsung Cuma Puluhan	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
8	Ahok : Ikuti Perkembangan RUU Pilkada Sambil Kerja	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan

9	Ahok Ogah Jadi Gubernur Lagi Jika RUU Pilkada Disahkan	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
10	BW Sebut Potensi Korupsi Pilkada Tidak Langsung Lebih Besar	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
11	Demo RUU Pilkada Mulai ‘Panas’	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
12	Demokrat Bertahan Usung Opsi Ketiga	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
13	Demokrat Dukung Pilkada Dengan 10 Syarat, PDIP Tidak Perlu	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
14	Diputus Hari ini, Ke Mana Arah RUU Pilkada	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
15	Golkar: Ada 10 Kader Penghianat Dukung Pilkada Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
16	Golkar Pastikan 78 Anggota Fraksi Dukung Pilkada Tidak Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
17	Gubernur Sulut Demokrasi Terbaik Melalui Pilkada Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
18	Ini Instruksi Ical Kepada Priyo Jelang Sidang Paripurna	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
19	JK Optimis Pilkada Tetap Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
20	JK-Surya Paloh Bahas Hiruk-pikuk RUU Pilkada di Senayan	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
21	Ketua DPRD Karanganyar Ancam Boikot RUU Pilkada Tak Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
22	Ketua Panja Berharap RUU Pilkada Tak Berakhir Dengan Voting	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
23	Koalisi Merah Putih tak Khawatir Demokrat Dukung Pilkada Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
24	Komisi II Paripurna RUU Pilkada Bersih	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan

	Tanpa Suap			
25	Partai Yang Ingin Pilkada tak Langsung Musuh Rakyat	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
26	Pemerintah : Pilkada Langsung Sesuai UUD 1945	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
27	Perdebatan RUU Pilkada Alot, Anggota DPR Minta Lobi	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
28	Perjuangkan Pilkada Tak Langsung, KMP Maksimalkan Kekuatan	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
29	PKS Klaim 12 Ormas Islam Menghendaki Pilkada Tak Langsung	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
30	PKS Terus Lobi Demokrat agar Berubah Haluan	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
31	Pramono Yakini Lobi RUU Pilkada Mengerucut Dua Alternatif	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
32	RUU Pilkada Bakal Disahkan, Ini Harapan Jokowi	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
33	RUU Pilkada Diputus Hari Ini	RUU Pilkada	25 September 2014	Tidak Dimasukkan
34	Pengamat : Demokrasi Disandera Oligarki Parpol	RUU Pilkada	26 September 2014	Dimasukkan
35	Ridwan Kamil : Demokrasi Mengalami Kemunduran	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
36	SBY Akan Gugat UU Pilkada ke MK, Apa Kapasitasnya	SBY	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
37	Ada Bendera Demokrat di Ajang Kumpul Koalisi Merah Putih	Demokrat	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
38	Ahok Yakini Asosiasi Kepala Daerah Bakal Gugat UU Pilkada	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
39	Apa Kabar Sepuluh Pilkada di NTT	Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan

40	DPR Pangkas Hak Politik Warga Negara	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
41	Ganjar Pranowo Ogah Nyalon Pilkada Lewat DPRD	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
42	Jokowi Kecewa DPR Putuskan Pilkada Lewat DPRD	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
43	Jokowi Siapkan Perlawanan Terhadap UU Pilkada	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
44	Kekecewaan Terhadap UU Pilkada Jadi Tranding Topic	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
45	Koalisi Merah Putih Dianggap Bajak Suara Rakyat	RUU Pilkada	26 September 2014	Dimasukkan
46	Netizen Ungkap Kekecewaan Melalui #ShameOnYouSBY	SBY	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
47	Pilkada Lewat DPRD Picu Korupsi Lebih Besar	RUU Pilkada	26 September 2014	Dimasukkan
48	Pilkada Oleh DPRD, Parpol Harus Simak Aspirasi Rakyat	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
49	Pilkada Tidak Langsung Pun Rentan Politik Uang	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
50	PKB Dorong MK Batalkan UU Pilkada	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
51	Ricuh, Meja Pimpinan Sidang Dibanjiri Anggota Dewan	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
52	Sah, Pilkada Dipilih DPRD	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
53	SBY : Jangan Ada Kemunduran Demokrasi	RUU Pilkada	26 September 2014	Dimasukkan
54	Tidak Ingin Jadi Budak Dewan, Ahok Ogah Maju Pilkada 2017	RUU Pilkada	26 September 2014	Tidak Dimasukkan
55	Aksi WO Demokrat Dinilai Ajaib	Demokrat	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
56	Bupati Wakatobi dan Bojonegoro Kecewa Pilkada Melalui DPRD	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan

57	Campur Aduk Perasaan Pengetuk UU Pilkada	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
58	Nudirman: Saya Pilih Rakyat Ketimbang Partai Golkar	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
59	PDIP Akan Gugat UU Pilkada ke MK	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
60	Pilkada Masalah Trust	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
61	SBY Merasa Berat Tanda Tangani UU Pilkada	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
62	UU Pilkada Ditetapkan, Risma Cuek	RUU Pilkada	27 September 2014	Tidak Dimasukkan
63	Akbar Faisal : Catat Nama Politisi Yang Rampas Hak Rakyat Indonesia	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
64	Pengamat : Demokrat Ingin Jadi Pahlawan	Demokrat	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
65	Pengamat : Dalang Walk Out Demokrat Adalah SBY Sendiri	SBY	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
66	Pengamat : Rakyat Terlanjur Marah, SBY Masih Bisa Berbuat Kebaikan	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
67	Perludem Akan Gugat UU Pilkada Pekan Depan	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
68	SBY Ditantang Keluarkan Dekrit Presiden Tolak UU Pilkada	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
69	SBY Harus Pecat Kader PD yang Walk Out	Demokrat	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
70	SBY Minta Pendapat MK Tentang UU Pilkada	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
71	Gugat UU Pilkada, Perludem Kumpulkan 32 Ribu KTP	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
72	Tolak UU Pilkada, Ratusan KTP dikumpulkan di Bundaran HI	RUU Pilkada	28 September 2014	Tidak Dimasukkan
73	Bagaimana Bisa SBY Tiba-tiba Kaget dan Mau	SBY	29 September 2014	Tidak Dimasukkan

	Menggugat			
74	Demokrat Dukung SBY Gugat UU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
75	Demokrat Sesalkan Partai Lain tak Dukung Usul Demokrat	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
76	Demokrat Tampik Ada Transaksi Politik di RUU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
77	Jokowi Dorong Masyarakat Gugat RUU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
78	Jokowi : Pertimbangkan Revisi UU Pilkada Setelah Dilantik	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
79	Jokowi-JK Diminta Siapkan Langkah Political Review Perppu	Perppu	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
80	Lima : SBY Otak Pembunuhan Demokrasi	SBY	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
81	Max Bantah Terima Instruksi WO Dari SBY	SBY	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
82	PDIP Klaim Dukung Opsi Demokrat, Edhie Mana Buktiya	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
83	Perppu Jokowi Bisa Memutus Kontroversi UU Pilkada	Perppu	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
84	Pilkada Tak Langsung Persempit Ruang Demokrasi	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
85	Pramono Edhie : Tak Ada Miskomunikasi Soal Walk Out	Demokrat	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
86	Ribuan Warga Akan Menggugat UU Pilkada	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
87	Ruhut Desak Nurhayati dan Max Mengundurkan Diri	Demokrat	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
88	Siang Ini Demokrat Buka Suara Soal Aksi Walk Out	Demokrat	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
89	Siapa Dalang Aksi Walk Out, Syarief : Tanya Ketua Fraksi	Demokrat	29 September 2014	Tidak Dimasukkan

90	UU Pilkada Jalan Pulang ke Masa Orde Baru	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
91	UU Pilkada, Tak Fair Salahkan SBY	RUU Pilkada	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
92	Waketum Demokrat Harus Tertulis, Bukan Cuma Ocehan	Demokrat	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
93	Walk Out Demokrat Inisiatif Ketua Fraksi	Demokrat	29 September 2014	Tidak Dimasukkan
94	Demokrat Bantah Isu Barter Jatah Pimpinan MPR	Demokrat	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
95	Demokrat Ingin SBY Soft Landing di Akhir Jabatannya	SBY	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
96	Demokrat Perjuangkan Pilkada Langsung Sampai Kapanpun	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
97	Fadel : Nurhayati Kandidat Kuat Ketua MPR	Demokrat	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
98	Jokowi Dukung SBY Terbitkan Perppu Pilkada	Perppu	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
99	Kecil Kemungkinan SBY Tak Tahu Soal Aksi Walk Out Demokrat	Demokrat	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
100	Ketua DPRD Depok Berharap MK Batalkan UU Pilkada	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
101	KPK : Kasus Korupsi Tidak Berkaitan dengan Pilkada Langsung	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
102	Max Sebut Aksi Walk Out Tanggung Jawab Ketua Fraksi	Demokrat	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
103	Mendagri: Perppu Itu Subjektivitas Presiden	Perppu	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
104	Nurhayati: SBY Memahami Aksi Walk Out Demokrat	SBY	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
105	Perjuangkan Perppu Pilkada, Demokrat Harus Ajak PAN	Perppu	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
106	Poempida Surati SBY, Sebut Putusan RUU	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan

	Pilkada tak Sah			
107	SBY Akan Tanda Tangani UU Pilkada Lalu Terbitkan Perppu	Perppu	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
108	SBY Tak Punya Cela Batalkan UU Pilkada	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
109	SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Demokrat Harap Dukungan Rakyat	Perppu	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
110	Siapkan Perppu Pilkada, SBY Mohon Restu Rakyat	Perppu	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
112	Yusril Sarankan SBY Tak Tanda Tangani RUU Pilkada	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
113	Yusril Temui SBY di Kyoto Bahas RUU Pilkada	RUU Pilkada	30 September 2014	Tidak Dimasukkan
114	Gerindra Minta SBY Sikapi UU Pilkada Secara Negarawan	RUU Pilkada	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
115	Gerindra Tertawa SBY Akan Terbitkan Perppu	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
116	BJ Habibie : Perppu Pilkada Langsung Baik	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
117	Demokrat Belum Berikan Sanksi Kepada Anggota yang Walk Out	Demokrat	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
118	DPRD Depok Siap Jalankan Pilkada Tak Langsung	RUU Pilkada	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
119	Fraksi Gerindra Akan Kaji Perppu Pilkada Dari SBY	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
120	Ini Komentar Jokowi Soal Wacana Pemilihan Presiden Oleh MPR	Pilpres	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
121	Jimly Melihat Ada Opsi Lain Selain Perppu	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
121	Ketua DPP Hanura Sayangkan Perppu SBY	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
123	KPK : UU Pilkada Lahirkan Korupsi Lebih Dahsyat	RUU Pilkada	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
124	KPK Prediksi Politik	RUU Pilkada	1 Oktober 2014	Tidak

	Uang Marak di Pilkada			Dimasukkan
125	Marzuki Alie : Kondisi Genting dan Memaksa Perppu Diuji DPR Baru	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
126	Masyarakat Yogyakarta Kirim Petisi Tolak UU Pilkada ke MK	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
127	Perppu Kan Berisi 10 Usul Fraksi Demokrat	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
128	PKS : Tak Ada Situasi Genting Keluarkan Perppu	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
129	SBY Ajukan Perppu, Demokrat Juga Harus Konsisten	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
130	Soal Perppu SBY, Aria : Ga Ngerti Maunya Apa!	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
131	Tolak UU Pilkada, Mahasiswa Bakar Keranda	RUU Pilkada	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
132	Tuai kecaman, SBY Putuskan Keluarkan Perppu terkait UU Pilkada	Perppu	1 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
133	Demo UU Pilkada di Palu, Mahasiswa dan Polisi Bentrok	RUU Pilkada	2 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
134	Sah, SBY Terbitkan Perppu Pilkada Langsung	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
135	SBY Gelar Rapat Kabinet Siapkan Perppu Pilkada	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
136	Sore Ini SBY Sampaikan Perppu Pilkada kepada DPR	Perppu	2 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
137	#TerimaKasihSBY Puncaki Trending Topic	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
138	Agar Tak Tertampar Dua Kali, NasDem Minta Demokrat Serius Urus Perppu	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
139	Demokrat Akan Matimatian Menggolkan Perppu Pilkada di DPR	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
140	Fraksi Partai Demokrat	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak

	Akan Yakinkan KMP Soal Perppu Pilkada			Dimasukkan
141	Ketua DPD : Perppu Harus Dipakai Untuk Pilkada 2015	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
142	PAN : Kalau Pendekatan ke KMP Buruk, Perppu Bisa Ditolak	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
143	Perppu Diterbitkan, PKB : SBY Mau Dengarkan Aspirasi Kita	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
144	Perppu Pilkada Lebih Lengkap dari 10 Syarat PD	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
145	Perppu SBY Diyakini Mental di DPR	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
146	Politisi PDIP : Perppu Konsekuensi Aksi Walk Out Demokrat	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
147	SBY Disarankan Lakukan Ini Agar Perppu Lolos di DPR	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
148	SBY Terbitkan Perppu, Hanura : Sesuai Harapan Masyarakat	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
149	SBY Terbitkan Perppu, Jokowi : Percuma Kalau Ditolak Lagi	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
150	SBY Terbitkan Perppu, Sinyal Demokrat Merapat ke Koalisi Pendukung Pemerintah	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
151	Soal Perppu, PKB Tunggu Keseriusan SBY dan PD di Parlemen	Perppuv	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
152	Terbitkan Perppu, Langkah SBY Dinilai Hambar	Perppu	3 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
153	Ada Deal Antara SBY, Demokrat dan DPR Jika Perppu Disetujui	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
154	Gerindra Sebut Masyarakat Cuek Pada Pilkada	RUU Pilkada	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
155	Gerindra Sebut Perppu SBY Tidak Lazim	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan

156	Keluarkan Perppu, SBY Dinilai Tengah Mainkan Political Tricky	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
157	Politisi PKB Optimis Perppu Pilkada Lolos di DPR	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
158	Ruhut : Tak Dukung Perppu, Parpol akan Kena Azab	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
159	SBY Keluarkan Perppu, Demokrat Bantah Pencitraan	Perppu	4 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
160	WNI di London Demonstrasi Tolak UU Pilkada	RUU Pilkada	5 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
161	SBY Terbitkan Perppu, MK Tetap Uji Materi UU Pilkada	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
162	Ketua DPR Belum Terima Perppu Pilkada	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
163	Puluhan WNI di Adelaide Aksi Tolak UU Pilkada	RUU Pilkada	6 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
164	SBY Berkicau KMP Setuju Perppu Pilkada, Idrus Marham Berkelit	Perppu	6 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
165	Perppu SBY Dinilai Omong Kosong	Perppu	8 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
166	Tolak UU Pilkada, Ribuan Laskar Dewa Ruci Bergerak Menuju Istana	RUU Pilkada	8 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
167	Hak Suara Saya Sudah Mati	RUU Pilkada	10 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
168	Kemenlu : Pengesahan UU Pilkada dan BDF Itu Berbeda	RUU Pilkada	10 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
169	SBY : Pilkada Langsung Ciptakan Hubungan Antara Pemilih dan Calon Pimpinan	RUU Pilkada	10 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
170	Polisi Amankan Mahasiswa Berdemo Tolak UU Pilkada	RUU Pilkada	11 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
171	Ucapan SBY Dukung Pilkada Langsung Patut	SBY	11 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan

	Dipertanyakan			
172	Berlaku Sementara, Perppu Masih Butuh Restu DPR	Perppu	13 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
173	Hari Ini, MK Gelar 6 Sidang Uji Materi UU Pilkada	RUU Pilkada	13 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
174	Indo Survei Ajukan Uji Materi Perppu Pilkada Langsung	Perppu	13 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
175	Pengamat : Pilkada Tak Langsung Sama dengan Genosida Politik	RUU Pilkada	13 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
176	SBY Padamkan Polemik Pilkada Pakai Sedotan, Bukan Selang	SBY	13 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan
177	Demonstran UU Pilkada Tuntut DPR Minta Maaf	RUU Pilkada	14 Oktober 2014	Dimasukkan
178	Hendardi : SBY Bapak Demokrasi, Pembunuh Kebebasan	SBY	15 Oktober 2014	Tidak Dimasukkan

Sumber : Olahan Peneliti

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama	: Luthfi Afif Azzaenuri
Nama Panggilan	: Luthfi
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 01 Januari 1992
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Nikah
Tinggi, Berat Badan	: 165 cm, 55 kg
Kesehatan	: Sangat Baik
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jl. Koptu Barlian Lingk. Troglo Wetan RT 003 RW 002, Antirogo, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Alamat Yogyakarta	: Dusun Maguwo RT 15 RW 27 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Handphone	: 089604149261 / 085257799063
Email	: luthfi.suka@gmail.com
Hobby	: <i>Ngintrik</i> dan Travelling
Motto	: Resiko dari bersikap konsisten adalah kehilangan teman. Resiko dari bersikap inkonsisten adalah kehilangan diri sendiri.

PENDIDIKAN FORMAL

- TK Bina Anaprasa, Antirogo, Sumbersari, Jember
- SDN Antirogo II, Antirogo, Sumbersari, Jember
- MTs. I Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura
- MA. I Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep Madura
- Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Madrasah Diniyah Darul Ulum, Gudang Kokap, Bedadung, Pakusari, Jember
- Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa, Guluk-guluk, Sumenep, Madura
- Madrasah Diniyah Baramij Tarbiyah wa al-Ta'lim, Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa, Guluk-guluk Sumenep, Madura

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Sanggar Pelangi Guluk-guluk, Sumenep, Madura
- Anggota Club Teater Lubangsa – Pamor, Guluk-guluk Sumenep, Madura
- Sekretaris OSIS MTs. I Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura
- Wakil Ketua OSIS MA. I Annuqayah Guluk-guluk, Sumenep, Madura
- Ketua Ikatan Santri Annuqayah Jawa (IKSAJ)
- Lingkaran Metalogi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Kordinator Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Kader (P2SDK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Humaniora Park Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
- Pengurus Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Anggota Forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta (FBD)
- Anggota Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI)
- Anggota Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI)

- Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY), PPM. Hasyim Asy’arie, Sewon, Bantul, Yogyakarta
- Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK)
- Dewan Penasehat Majalah FISH Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
- Wakil Ketua BEM Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
- Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
- Wakil Sekretaris DPW Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (GEMASABA) Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dewan Penasehat Gerakan “Saya, Perempuan Anti Korupsi” Yogyakarta (SPAK - Jogja)
- Kordinator Program The Indonesian View (TIV) Yogyakarta

PENGALAMAN KERJA

- Operator Warnet “Jackie” (2011)
- Supir Rental Freelance (2011 - 2013)
- Enumerator PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) Universitas Gadjah Mada (2013)
- Tim Media dan Manajemen Isu Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) (2015 – sekarang)